

# EKBISI

## JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Vol. VII No. 1, Desember 2012

**Utilizing Hedging for Reducing Financial Risk in Islamic Finance Views**

~ M. Kurnia Rahman Abadi ~

**Perbandingan Kinerja Investasi Syariah Dan Konvensional:  
Studi Pada Jakarta Islamic Index (JII) Dan Indeks LQ45**

~ Mamduh M. Hanafi & Syafiq M. Hanafi ~

**Kajian Interpedensi Antara FDI dan Variabel Makro Ekonomi di Indonesia dan Malaysia:  
Pendekatan Model Vector Autoregressive dan Vector Error Correction 1970-2005**

~ Heri Sudarsono ~

**Bunga Bank dalam Perspektif Ushul Fiqh (Bukan Ribakah Bunga Bank?)**

~ M. Yazid Affandi ~

**Peran Anak sebagai Penopang Ekonomi Orang Tua:  
Kajian Empiris Rumah Tangga Muslim di Indonesia**

~ Mohtar Rasyid ~

**Peluang Pengembangan UMKM di Yogyakarta Pasca  
Pemberlakuan ASEAN-Cina Free Trade Area (ACFTA)**

~ Joko Setyono ~

**Aksioma Etika dalam Ilmu Ekonomi Islam**

~ Muhammad Kamal Zubair ~

**Evaluasi Kinerja Manajemen Perubahan (melalui breakthrough innovation)  
Jasa Pendidikan Serta Pengaruhnya terhadap Stakeholders**

~ M. Faisal ~

**Kebijakan Anggaran Pemerintah Bagi Sektor Pendidikan**

~ Muhammad Ghafur Wibowo ~

**Konsepsi Agro-Ekonomi Islami; Relasi Metafisik antara Ekonomi dan Ekologi**

~ Zenno Noeralamsyah ~

# EKBISI

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam  
Vol. VII No. 1, Desember 2012

## SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Ketua Penyunting : Muh. Ghafur Wibowo

Penyunting Pelaksana : - Slamet Haryono

- Moch. Yazid Afandi

- M. Kurnia Rahman

- Syafiq M. Hanafi

- Sunaryati

Sirkulasi : Supiartiwi

Alamat Redaksi : Forum Pengembangan Ekonomi Islam (FPEI),

Program Studi Keuangan Islam (KUI),

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto, No.35 Yogyakarta 55281

Telp & faks.: (0274) 512840

Email: [ekbisi\\_uinsuka@yahoo.co.id](mailto:ekbisi_uinsuka@yahoo.co.id)

“**Jurnal EKBISI** adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Forum Pengembangan Ekonomi Islam (FPEI) Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga. Pertama kali terbit pada Desember 2006 (Vol. 1, No. 1, Desember 2006). Jurnal **EKBISI** merupakan publikasi ilmiah di bidang ekonomi dan bisnis, baik dalam konteks ekonomi syariah maupun ekonomi mainstream, terbit 2 (dua) kali setahun (Juni & Desember). Jurnal **EKBISI** menerima artikel dari berbagai kalangan akademisi dan praktisi yang berminat di bidang ekonomi dan bisnis Islam.”

**DAFTAR ISI**  
(Vol. VII No. 1, Desember 2012)

- Utilizing Hedging for Reducing Financial Risk in Islamic Finance Views**  
~ M. Kurnia Rahman Abadi..... 1-15
- Perbandingan Kinerja Investasi Syariah Dan Konvensional: Studi Pada Jakarta Islamic Index (JII) Dan Indeks LQ45** ~ Mamduh M. Hanafi&Syafiq M. Hanafi.... 16-27
- Kajian Interpedensi Antara FDI dan Variabel Makro Ekonomi di Indonesia dan Malaysia: Pendekatan Model Vector Autoregressive dan Vector Error Correction 1970-2005** ~ Heri Sudarsono..... 28-42
- Bunga Bank dalam Perspektif Ushul Fiqh (Bukan Ribakah Bunga Bank?)**  
~ M. Yazid Affandi..... 43-57
- Peran Anak sebagai Penopang Ekonomi Orang Tua: Kajian Empiris Rumah Tangga Muslim di Indonesia** ~ Mohtar Rasyid..... 58-71
- Peluang Pengembangan UMKM di Yogyakarta Pasca Pemberlakuan ASEAN-Cina Free Trade Area (ACFTA)** ~ Joko Setyono..... 72-87
- Aksioma Etika dalam Ilmu Ekonomi Islam**  
~ Muhammad Kamal Zubair..... 88-100
- Evaluasi Kinerja Manajemen Perubahan (melalui breakthrough innovation) Jasa Pendidikan Serta Pengaruhnya terhadap Stakeholders** ~ M. Faisal..... 101-114
- Kebijakan Anggaran Pemerintah Bagi Sektor Pendidikan**  
~ Muhammad Ghafur Wibowo ..... 115-123
- Konsep Agro-Ekonomi Islami; Relasi Metafisik antara Ekonomi dan Ekologi**  
~ Zenno Noeralamsyah..... 124-135

## **Signifikansi Aksioma Etika Dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam**

***Muhammad Kamal Zubair***

**Dosen STAIN Parepare**

***kamal\_zubair@yahoo.co.id***

### **Abstrak**

*This article will try to elaborate related of Islam economics and ethics. Discussion instructed as effort dig of role of Islamic ethics so that can be obtained by elementary principles for the agenda of Islamic economic implementation. Islamic ethics as a basic of Islamic economic require to be formulated furthermore become more values so that in the end can be a formula of behavioral for all economic agent. The important step to formulated behavioral methods of economics in Islam economics is to compile axiom system which is representatif and also can catch precisely Islamic ethics spirit and formulate base statement of economics. Precept of Islam morality have to be taken as peripheral of minimum axiom to determine authenticity of logical statement concerning economic behavior in Islam society because islamic ethics have a power of strength and a set trusts of universal Islam. Common postulate which there are in Islamic economic theory is merger of ethics and economics was elaborated in forming of behavioral methods of economics in society. The behavior attributed to four kinds of ethics axiom which together form very logical Islamic ethics system. As creature of teomorfis (axiom of taubid) was given mandate for the dispersive of to benefaction and justice in all life aspects (axiom of equilibrium), human being given the freedom of economics to improve ethos and effort (freedom axiom). But freedom of this effort with the coverage of wide have estuary to (responsibility axiom), by life in the world and the beyond later.*

**Kata Kunci : Aksioma, Etika, Islam dan Ilmu Ekonomi**

## Pendahuluan

Permasalahan ekonomi pada dataran praktisnya adalah permasalahan yang dihadapi semua orang tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan permasalahan ekonomi berkaitan langsung dengan masalah pemenuhan kebutuhan manusia untuk melangsungkan hidupnya. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia dari zaman ke zaman dan seiring dengan bertambahnya komunitas serta berevolusinya aktivitas ekonomi, dari yang sangat sederhana kepada aktivitas ekonomi yang modern, maka permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia semakin kompleks. Pokok masalahnya tidak lagi sekedar pada bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan alat-alat pemenuh kebutuhan yang tersedia (terbatas), tetapi juga pada kepentingan seseorang yang dibatasi kepentingan orang lain. Untuk menjawab permasalahan tersebut, para pemikir dari berbagai kalangan, mulai dari filosof, politikus, sosiolog dan tentunya ekonom sendiri telah mengemukakan gagasan mereka berkaitan dengan permasalahan ekonomi yang kemudian memunculkan aliran pemikiran ekonomi.

Peran ilmu ekonomi sesungguhnya adalah mengatasi dan menyelesaikan masalah kelangkaan dan penyebabnya sehingga dapat dicapai kesejahteraan abadi (*falah*) setiap individu. Oleh karena itu terdapat tiga hal dasar yang perlu dijawab oleh ilmu ekonomi, yaitu komoditi apa yang perlu diproduksi untuk mendapatkan kesejahteraan, bagaimana komoditi diproduksi agar kesejahteraan dapat tercapai serta bagaimana kesejahteraan didistribusikan agar setiap individu mendapatkan kesempatan yang adil secara sosial untuk membangun kepribadiannya dan mencapai kesempurnaannya sesuai dengan kemampuannya. (Misanan,dkk., 2008:55)

Ketiga persoalan ini sangat mendasar dan berbagai sistem perekonomian selalu berusaha untuk memecahkannya dengan cara yang berbeda. Dua aliran besar pemikiran yang mewarnai sistem ekonomi dunia hingga saat ini adalah kapitalisme dan sosialisme. Aliran utama ekonomi (*main stream economics*) pada awalnya terkotak menjadi dua kutub, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Kedua paham ini seringkali dikonotasikan sebagai representasi perilaku ekonomi negara tertentu, misalnya Kapitalisme dianut oleh Amerika dan Sosialisme dicerminkan oleh Uni Soviet. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan ekonomi dan politik antar negara maka kritik terhadap kedua paham ini bermunculan sehingga lahirlah kapitalisme campuran

atau sosialisme campuran. Aliran-aliran pemikiran tersebut berbeda satu sama lain dalam hal-hal yang bersifat ideologis hingga mempengaruhi pola dan operasionalisasi sistem ekonominya. Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan pada ideologi yang memberi landasan dan tujuannya di satu pihak dan aksioma-aksioma serta prinsip-prinsipnya di lain pihak. (Kahf, 1995:5)

Kapitalisme yang sering dinisbahkan kepada Adam Smith muncul dengan mendasarkan pemikiran ekonominya pada etika hukum alam, dengan mengajukan konsep pasar bebas. Adam Smith menegaskan pentingnya peran rasa simpati dalam kehidupan sosial, sebab perasaan itu mendorong manusia *to have interest in the fortune of others, and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it except the pleasure of seeing it*". Buku tentang ekonomi yang pertama ditulis oleh Adam Smith adalah *Theory of Moral Sentiment* (1759) tidak mendikotomikan realitas dan norma, sebelum kemudian ia menulis buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) yang sangat mengedepankan corak individualistis (*self interest*) hingga merenggangkan kerekatan sosial masyarakat dan menampakkan kecenderungan untuk meninggalkan nilai-nilai etika yang ada didalamnya. Bahkan menurut Max Weber, jika semula kapitalisme tumbuh dan berkembang karena menggunakan prinsip etika Protestan, maka kemudian karena adanya pergantian prinsip tersebut, kapitalisme akan menghancurkan agama beserta nilai-nilai ajarannya. (Triuwono, 2000: xiii)

Pada sisi yang lain, Karl Marx muncul dengan mengibarkan bendera sosialisme. Marx mengkritik proses dehumanisasi pada sistem ekonomi kapitalisme yang menyembah kesucian *self-interest* tanpa mempunyai kepedulian terhadap *self-respect* manusia, dan menawarkan sistem ekonomi sosialis dengan karakteristik penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan penghapusan kelas-kelas sosial. (Suseno,1999:159-174). Dalam perkembangannya, sosialisme pun dianggap mengabaikan nilai-nilai kebebasan individual manusia dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi.

Kapitalisme mendapat kecaman karena kian lunturnya nilai-nilai etis yang melandasi munculnya sistem tersebut dan sementara sosialisme hanya berjalan di tempat karena mengabaikan nilai-nilai kebebasan individual manusia. Satu hal yang dapat kita kemukakan berkaitan dengan hal ini adalah bahwa suatu sistem ekonomi

harus ditopang oleh nilai-nilai etis yang menjunjung harkat manusia dan nilai-nilai yang telah tertanam dalam diri manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*). Jadi pokok permasalahannya terletak pada nilai-nilai baik dan buruk yang dijadikan sebagai dasar pandangan hidup atau yang lebih tegasnya dapat disebut etika.

Wacana ekonomi Islam yang muncul belakangan setelah kapitalisme dan sosialisme tampak sangat mengedepankan sisi etika yang disandarkan pada ajaran Islam. Bahkan juga dikatakan bahwa sisi etika inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya. Etika yang dimaksud disini adalah etika yang diambil dari ajaran agama Islam di mana setiap agama memberikan pedoman etika bagi pemeluknya. (Raharjo,1990:1)

Pengembangan yang sistematis dengan latar belakang ekonomi tentang prinsip-prinsip etika Islam dielaborasi oleh Syed Nawab Haidar Naqvi dalam empat pokok aksioma yang merupakan pendapat yang dijadikan pedoman dasar dan menjadi pernyataan yang diterima sebagai kebenaran dan bersifat umum, tanpa memerlukan pembuktian. Aksioma etika tersebut meliputi tauhid, keseimbangan, kehendak bebas dan tanggungjawab. Naqvi mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.(Naqvi, 2003:28). Dengan perangkat etika ini, sistem ekonomi Islam diyakini mampu mengatasi berbagai macam krisis yang muncul berkaitan dengan permasalahan ekonomi.

Masalahnya kemudian adalah bagaimana format sintesa yang tepat antara etika dan sistem ekonomi sehingga satu sama lain saling mendukung. Tulisan ini akan mencoba menguraikan keterkaitan etika dan ekonomi Islam. Pembahasan diarahkan sebagai upaya penggalian peran moral dan etika Islam sehingga dapat diperoleh prinsip-prinsip yang mendasar dalam rangka implementasi ekonomi Islam.

## **Pembahasan**

### **Keterkaitan Etika dan Ilmu Ekonomi**

Pada masa di mana ekonomi belum menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri, etika memerankan dua peran dalam wilayah ekonomi. Pertama sebagai piranti untuk menilai konseptualisasi fenomena-fenomena ekonomi. Kedua, memberikan kriteria untuk menilai praktek ekonomi. (Kurian,1995:371). Hal ini terkait dengan kenyataan

bahwa bagaimana mengatur kehidupan ekonomi dan berperilaku sehari-hari, sudah ada sebelum ada teori ekonomi. (Soule, 1994:10).

Ekonomi, secara umum, didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumberdaya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Ilmu ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. (Samuelson, 1989:29).

Dengan definisi seperti ini maka ilmu ekonomi dapat dicakup oleh agama, sebab ia merupakan salah satu bentuk perilaku kehidupan manusia. Setiap agama pasti, secara definitif, memiliki pandangan mengenai cara manusia berperilaku mengorganisasi kegiatan ekonominya. Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Cakupan ilmu pengetahuan dan agama adalah saling bertemu, dan karenanya keduanya dapat terjalin suatu hubungan yang erat. (Kahf,1995:7).

Untuk menjelaskan keberadaan etika dalam suatu sistem ekonomi, digunakan teori yang diajukan oleh Richard T. De George dalam mengevaluasi moralitas suatu sistem ekonomi. Menurutnya, untuk mengevaluasi moralitas suatu sistem ekonomi adalah dengan membuat konstruksi model dari sistem tersebut kemudian menentukan komponen-komponen pokoknya, dan setelah itu mengevaluasinya dari sudut pandang moral. Apabila secara struktural terdapat elemen yang immoral, maka cukup elemen tersebut yang diganti. Sementara bila unsur moralnya secara inheren terdapat pada sistem tersebut, maka sistemnya yang harus diganti. (De George,1995:142-143).

Dalam konteks ini, Khursyid Ahmad -*seorang ekonom muslim*- secara tajam mengkritik ekonomi *mainstream* dengan mengatakan bahwa paradigma ekonomi konvensional yang muncul saat ini bercirikan pada paradigma yang berupaya melepaskan ilmu ekonomi dari semua kaitan transendental dan kepedulian etika, agama dan nilai-nilai moral. Pendekatan yang sangat sekuler dan berorientasi duniawi, positivistik dan pragmatis. Lebih dari itu, ilmu ekonomi, berkembang sebagai sebuah disiplin yang semata-mata mengitari pusat kepentingan diri, usaha pribadi, mekanisme pasar dan motif mencari keuntungan semata. Situasi riil dunia sekarang membuat



banyak ekonom meragukan secara serius universalitas, realitas, produktivitas dan bahkan moralitas sejumlah asumsi dasar dan konsepsi inti paradigma tersebut dalam menganalisis dan menformulasi pemecahan masalah ekonomi. (Ahmad, 2003:v).

Bahkan lebih jauh Khursyid Ahmad menegaskan bahwa teori ekonomi yang dibungkus di dalam asumsi-asumsi paradigma klasik dan neo-klasik patut diragukan. Dengan mengutip Amitai Etzioni, ia menyatakan bahwa paradigma neo-klasik, individualistik, rasionalistik dan utilitarianistik yang menggiurkan yang diterapkan di bidang ekonomi dan juga relasi-relasi sosial kini mendapat tantangan. Tantangannya menyangkut bagian inti paradigma ekonomi neo-klasik yang tidak saja mengabaikan dimensi moral, melainkan secara aktif menolak dimasukkannya dimensi moral tersebut. Sementara paradigma baru di sisi lain mengakui peran kunci nilai-nilai moral. (Etzioni,1988:ix-x).

Untuk mempertegas keterkaitan antara sistem ekonomi dengan etika dapat juga dengan melihat signifikansi konsep keadilan dalam bidang ekonomi. Keadilan sendiri merupakan suatu topik penting dalam etika. Orang yang berlaku adil maka dengan sendirinya berlaku etis. Dalam bidang ekonomi, arti penting keadilan tidak hanya sebatas perasaan atau sikap batin, tetapi menyangkut juga kepentingan banyak pihak. (Bertens, 2000:85). Dalam hal ini, sering dikatakan bahwa keadilan distributif, yaitu keadilan dalam keuntungan maupun beban merupakan komponen moral yang penting dalam sistem ekonomi. (De George,1995:162). Suatu sistem ekonomi yang mengatur kegiatan ekonomi suatu masyarakat, keberadaan etika tidak bisa diabaikan dan pada kenyataannya memang selalu ada.

Dalam hal ini, Dunfee dan Gunther (1999: 5-10) mengemukakan bahwa etika merupakan isu sentral dalam jasa keuangan. Sedangkan Turnipseed (2002: 1-15) menyatakan, tidak ada definisi etika bisnis yang dapat diterima secara universal, ataupun standar pengukuran yang memungkinkan seorang individu atau peristiwa yang akan dinilai secara keseluruhan sebagai etis atau tidak etis. Definisi perilaku etis maupun tidak etis, didasarkan pada sejauh mana sebuah tindakan yang dilakukan dianggap benar atau salah, baik atau jahat, jujur atau tidak jujur, ataupun adil atau tidak adil. (Hunt dan Vitell, 1986: 5-16). Hal ini diasumsikan bahwa etika adalah standar untuk menilai kebenaran tidak dari suatu tindakan seseorang, tetapi dari

tindakan satu orang terhadap yang lain, yaitu, etika merupakan dasar untuk penilaian dalam interaksi pribadi. (Bartels, 1967: 20-26). Robertson dan Anderson (1993: 617-644) mencatat bahwa perilaku etis sesuai dengan norma-norma yang diakui masyarakat secara luas (bermain adil, kejujuran, keterbukaan, dan sebagainya).

### **Etika Dalam Ekonomi Islam**

Jauh sebelum diskursus ekonomi Islam muncul, di dalam ekonomi telah ada perdebatan, apakah ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang sarat dengan nilai etika atau ilmu yang sama sekali menafikan nilai. Bagi yang berpendapat bahwa ilmu ekonomi sarat dengan nilai maka yang menjadi pertanyaan yang mendasar adalah *what ought to be* sedangkan yang berpandangan bahwa ilmu ekonomi itu bebas nilai, maka pertanyaan yang mendasar adalah *what is*. (Winardi, 1990:77-78). Oleh karena masuknya unsur etika dalam kawasan ilmu ekonomi menimbulkan problem metodologi yang cukup serius sebagaimana dalam perdebatan tersebut. Akan tetapi bilamana obyek kajian adalah ekonomi Islam, maka mau tidak mau unsur etika menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari gerakan ilmu ekonomi Islam. Hal ini karena dalam melihat ilmu ekonomi sebagai suatu obyek kajian ilmiah maupun ekonomi sebagai aktifitas ekonomi manusia, Islam menawarkan suatu pandangan yang komprehensif.

Merupakan suatu kenyataan bahwa kepercayaan agama tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari realitas aktivitas manusia sehari-hari, baik yang bersifat komersial maupun sosial. Demikian juga, ajaran-ajaran Islam mengatur semua kegiatan ekonomi. Ajaran ini semua berasal dari dua sumber; al-Qur'an dan al-Hadits. (Saeed, at. al., 2001: 127-142)

Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai suatu aspek dari kehidupan manusia di bumi. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi, semakin baik kehidupannya sepanjang mereka menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Ketaatan atau ketaqwaan kepada Tuhan tidak dipandang sebagai penurunan produktivitas ekonomi. Ketaqwaan dipandang akan membawa seseorang untuk lebih produktif. Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi -sebagaimana kegiatan lainnya- perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran

Islam secara keseluruhan. Dalam Islam, kegiatan ekonomi yang merupakan bagian dari kehidupan duniawi harus diletakkan dalam kerangka orientasi kehidupan ukhrawi. Ekonomi dalam pandangan Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan, yaitu bertitik tolak dari Tuhan dan memiliki tujuan akhir pada Tuhan. (Qardawi, 1997:76)

Pandangan Islam terhadap ekonomi, tepatnya materi ekonomi, yaitu harta sangatlah positif, namun bahwa posisi harta dalam kehidupan beserta produksinya berbeda dengan pemanfaatannya. (Nabhani,1996:50). Dari segi keberadaannya, materi atau kekayaan merupakan ciptaan Allah. Berbeda halnya dengan segi pemanfaatan, Islam mengharamkan pemanfaatan beberapa harta benda, di antaranya minuman keras. Dalam hal cara-cara memperoleh, Islam menggariskan hukum-hukumnya, seperti hukum waris. Dapat dikatakan, bahwa dalam hal pemanfaatan dan cara memperoleh manfaat terdapat intervensi hukum Islam. Pada wilayah inilah, ekonomi bersinggungan dengan aturan-aturan hukum yang telah digariskan Islam, di mana hukum Islam yang berkaitan dengan bidang ekonomi tercakup dalam pembahasan *fiqh muamalah*. Namun perlu dikemukakan bahwa antara ekonomi Islam dengan *fiqh muamalah* terdapat garis perbedaan yang harus diperjelas. Bagian dari *fiqh muamalah* adalah menetapkan kerangka di bidang hukum untuk kepentingan ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam mengkaji proses penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat. (Kahf,1995:6).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam Islam masalah ekonomi mendapat tempat tersendiri di mana dengan adanya intervensi hukum Islam, khususnya dalam bidang ekonomi menunjukkan adanya perhatian Islam terhadap bidang tersebut. Semua kegiatan ekonomi Islam secara tidak langsung dipengaruhi nilai-nilai dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dasar-dasar itulah yang membentuk suatu paradigma yang diterjemahkan dalam rangkaian sistem dengan serangkaian kebijakan.

Dilihat dari sifatnya, sistem ekonomi Islam menisbahkan institusi-institusi ekonominya pada sumber-sumber ilahiyah (*devine resources*). Dengan kata lain, Tuhan diposisikan sebagai pusat segalanya dan manusia adalah khalifahNya di bumi. Ini membedakan sifat sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya yang

cenderung mengabaikan sumber ilahiyah, sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. (Ali, 1988:17-18). Sehingga pembicaraan mengenai sistem ekonomi Islam merupakan pembicaraan tentang pengaruh yang dipancarkan oleh ajaran-ajaran Islam terhadap prinsip ekonomi yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan memuaskan berbagai keperluan manusia. Kesemuanya ini terkait dengan pembahasan sistem ekonomi yang memang harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruhi oleh pandangan hidup tertentu. (Nabhani,1996:48).

Jadi secara garis besar, jika dikaitkan dengan salah satu teori etika, yaitu teori perintah Tuhan yang menyatakan bahwa standar moral dari yang baik dan buruk adalah hukum Tuhan (*Gods Law*). (Barcalaw,1998:30), maka dalam sistem ekonomi Islam, Islam dengan semua ajaran-ajarannya, khususnya yang terkait dengan masalah ekonomi, berfungsi sebagai etika yang menjadi titik pandang untuk mengarahkan dan menuntun operasionalisasi sistem tersebut. Pembahasan tentang sistem ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai etika yang mendasarinya, sebagaimana Amartya Sen dalam bukunya *On Ethics And Economic* mengatakan bahwa persoalan-persoalan manusia yang mendasar dalam sistem ekonomi sekarang ini harus selalu dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan nilai. (Sen, 1987:31-32). Bahkan aspek yang membedakan ekonomi Islam dengan mazhab pemikiran lainnya, baik kapitalis maupun sosialis adalah keberpihakannya pada nilai etik dan penerimaannya pada agama sebagai sumber etika.

### **Reformulasi Etika Islam**

Pandangan Islam memiliki pondasi yang kuat dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan, dan memberikan arah dan tujuan dalam menciptakan nilai serta meningkatkan standar kehidupan masyarakat melalui usaha komersial selama mengikuti prinsip-prinsip ini. Pandangan Islam memberikan catatan yang sangat berharga dan sungguh unik mengenai aspek khusus tentang aktivitas manusia melalui tiga alasan: Pertama, Islam tidak mengakui adanya pemisahan antara urusan duniawi dan ukhrawi selama seseorang mencari keridhaan Allah dan

mengikuti perintah-Nya dalam melakukan seluruh aspek aktivitas sehari-hari. (Nadwi, 1978). Kedua, semua jenis usaha seseorang, termasuk usaha yang bertujuan komersial merupakan bagian dari kepercayaan agama. (Al-Faruqi, 1992). Ketiga, dalam Islam, semua usaha komersil merupakan bentuk kegiatan dari ibadah (QS: 107: 1–7).

Namun demikian, etika Islam sebagai pilar ekonomi Islam perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai-nilai yang lebih terinci sehingga pada akhirnya dapat menjadi rumusan penuntun perilaku para pelaku ekonomi. Nilai-nilai yang merupakan intisari dari moral Islam ini merupakan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang secara islami sah. Nilai-nilai ini merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu. (Misanan,dkk., 2008:56)

Langkah yang penting dalam merumuskan kaidah-kaidah perilaku ekonomi dalam ekonomi Islam adalah menyusun sistem aksioma yang representatif serta mampu menangkap secara tepat spirit etika Islam dan merumuskan dasar pernyataan-pernyataan ekonomi. Ajaran dasar moral Islam harus diambil sebagai perangkat aksioma minimal untuk menentukan keabsahan pernyataan-pernyataan logis tentang perilaku ekonomi dalam masyarakat Islam karena ajaran etika dalam Islam mengandung kekuatan dan seperangkat kepercayaan-kepercayaan Islam yang universal. (Naqvi, 2003: 34).

Nilai-nilai Islam ditransformasikan dalam seperangkat aksioma, kemudian dijadikan acuan dalam merumuskan perilaku ekonomi yang konsisten. Aksioma-aksioma tersebut akan dijadikan dasar untuk merumuskan pernyataan logis yang mengandung generalitas tentang ekonomi Islam. Untuk berfungsi sebagai dasar yang bisa menghasilkan pernyataan-pernyataan ekonomi dengan tingkat generalitas yang memadai, maka perangkat aksioma etik harus memenuhi lima sifat, yaitu :

1. Perangkat itu harus merupakan representasi pandangan yang memadai dan legitimate tentang etika Islam, yakni yang berasal dari al-Quran dan Hadis
2. Kumpulan aksioma harus berbentuk suatu dasar atau bersifat praktis

3. Independen, yang dibuktikan dengan menunjukkan bahwa tidak ada elemen dalam perangkat ini yang bisa dideduksi dari elemen yang lain.
4. Semua elemen harus konsisten satu sama lain dan tidak ada penyimpangan
5. Daya prediktifnya mampu menghasilkan serangkaian elemen tunggal dari perangkat aksioma.

Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomi dapat menghasilkan suatu perekonomian yang normatif, yang tidak akan bisa berjalan secara dinamis. Oleh karena itu implementasi nilai-nilai ini harus secara bersama-sama didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip inilah yang akan menjadikan bangunan ekonomi Islam kokoh dan dinamis, dan nilailah yang berfungsi untuk mewarnai kualitas bangunan tersebut. Dengan demikian, ilmu ekonomi Islam harus dikembangkan secara simultan dalam dua tingkat, yaitu harus merefleksikan pemahaman dan pengetahuan yang jelas terhadap esensi nilai etik dasar Islam agar dapat menemukan hakekat islami atau tidak islaminya prinsip-prinsip ekonomi dan menetapkan hipotesis tentang perilaku muslim yang dipandang representatif. (Naqvi, 2003: 30).

Secara eksplisit, memasukkan pertimbangan etis yang bersumber dari agama ke dalam perhitungan ekonomi dapat memberikan kontribusi berguna bagi pengetahuan ekonomi. Namun, untuk bisa eksis secara meyakinkan, harus dibuktikan bahwa menyatukan ekonomi dan etika, sistem Islam memang lebih unggul daripada sistem lain. Sistem ekonomi Islam merupakan buatan manusia dan keberhasilannya akan ditentukan oleh pengujian daya hidupnya yang bisa diterima secara universal.

### **Upaya Merumuskan Aksioma Etika**

Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri dan lingkungan sosialnya dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etika yang komprehensif untuk digunakan sebagai dasar yang memadai dalam merumuskan pernyataan ekonomi. Meskipun, masing-masing aksioma dijabarkan secara beragam dalam sejarah manusia, tetapi suatu konsensus yang luas telah berkembang tentang makna kumulatifnya bagi perspektif sosial ekonomi muslim. (Naqvi, 1993: 77-103).

## 1. Keesaan (*unity*)

Prinsip keesaan adalah bentuk dimensi vertikal sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan agama serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata.

Dalam pengertian absolut, kehidupan manusia di bumi ini secara keseluruhan berada dalam konsep tauhid yang hanya berhubungan dengan Tuhan. Prinsip ini menghasilkan keyakinan kesatuan dunia dan akhirat serta kesatuan umat manusia. Hal ini akan membawa seorang pelaku ekonomi untuk tidak hanya mengejar keuntungan material semata, namun juga keuntungan yang lebih kekal dan abadi serta menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Di sini tampak jelas konsep persamaan manusia, yang merupakan implikasi dari tauhid. Konsep persamaan manusia, menunjukkan bahwa Islam mengutuk manusia yang berkelas-kelas. Maka, implikasi dari doktrin ini ialah bahwa antara manusia terjalin persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu dan bekerjasama dalam ekonomi.

Dalam pandangan al-Quran, filsafat fundamental dari ekonomi Islam adalah tauhid. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Prinsip tauhid mengantar manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber dan berakhir pada Allah. Hal ini berlaku dalam kegiatan ekonomi dan mengantar manusia untuk meyakini bahwa harta benda yang didapatkan dari hasil usaha ekonomi adalah milik Allah. (Shihab,1997:409-410).

Dari konsepsi ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka etika dan

ekonomi menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal keterputusan. Jadi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan tauhid. Landasan filosofis inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme dan materialisme.

## **2. Keseimbangan (*equilibrium*)**

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. (Beekun,2000:23). Prinsip keseimbangan mengantar manusia meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Hal ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi dan selaras dengan dirinya sendiri, namun juga menuntutnya untuk menciptakan ketiga hal tersebut dalam masyarakat, bahkan alam seluruhnya.

Prinsip ini sebagai tambahan terhadap dimensi vertikal, yang dalam pengertian yang sangat istimewa adalah untuk menunjukkan keadilan. Kata *al-adl* berarti keseimbangan, sepadan, dan ukuran. (Munawwir, 1997:905-906). Istilah keadilan dalam al-Qur'an diungkapkan dengan kata *al-adl, al-qisth, al-mizan, al-abkam, al-qawam, amtsal, al-iqtisada*. (Raharjo,1996:374). Sifat adil bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Oleh karena itu, konsep *al-adl* dalam persepsi Islam adalah keadilan Ilahi, artinya moralitas didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Allah dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut.

Dalam perspektif Muthahhari, definisi keadilan mengarah pada empat hal, yaitu keadaan sesuatu yang seimbang, persamaan dan penafian segala bentuk diskriminasi, pemeliharaan hak-hak individu dengan pemberian hak kepada setiap orang yang berhak menerima dan memelihara hak bagi kelanjutan eksistensi keadilan Tuhan. (Muthahhari, 1981:66-70). Dengan berbagai muatan makna 'adil' tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan



dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan

Pada struktur ekonomi, agar kualitas keseimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi bisnis dalam genggamannya segelintir orang. Dengan demikian, keseimbangan, kebersamaan, merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas ekonomi. Jika keadilan tegak dimana-mana, maka keharmonisan sosial akan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Karena prinsip keseimbangan ini akan mengantar manusia kepada pencegahan segala bentuk monopoli, penimbunan, pemborosan dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok.

Termasuk dalam dimensi keadilan adalah pemerataan pendapatan dan kekayaan, sebab pada dasarnya Allah menganugerahkan alam semesta adalah untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Dalam pandangan Islam kekayaan tidak boleh hanya berada di tangan sekelompok kecil orang, sementara sebagian besar berada dalam kemiskinan. Kekayaan alam semesta harus didistribusikan dan dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah Islam. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih merata pada akhirnya juga merupakan persyaratan penting bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

### **3. Kebebasan (*free will*)**

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia “bebas”. Hanya Tuhan yang bebas, namun dalam batas-batas skema penciptaan-Nya, manusia juga secara relatif mempunyai kebebasan. (Naqvi, 1993:99). Kebebasan manusia untuk menentukan sikap - baik atau jahat – bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (*kehalifah*) Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Manusia dianugerahi kebebasan untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah di

muka bumi. Pada batas-batas tertentu, manusia mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri.

Prinsip kebebasan ini berlaku, baik bagi manusia secara individu maupun kolektif. Prinsip kebebasan yang dimaksud adalah suatu keyakinan pada diri seorang muslim, bahwasanya di samping memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan baik atau buruk yang ada dihadapannya, Allah juga memiliki kebebasan mutlak. (Shihab,1997:111). Kebebasan yang dimiliki Tuhan adalah absolut sementara kebebasan manusia bersifat relatif.

Manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumberdaya yang ada pada kekuasaannya. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumberdaya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Prinsip kehendak bebas berarti meniscayakan pembuatan rancangan kepranataan yang wajar untuk menjamin kebebasan ekonomi bagi individu dalam batas-batas etik yang ditentukan. Tetapi kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Islam tidak menyetujui hak individu atas kekayaan pribadi tanpa syarat karena semua kekayaan adalah milik Allah dan manusia hanya merupakan wakil-Nya di bumi. Oleh karena itu, seseorang tidak mempunyai suatu hak alami yang eksklusif atas apa yang ia peroleh.

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dalam transaksi ekonomi. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial. Dengan demikian, kebebasan kehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan. (Beekun,2000:24-25).

#### **4. Tanggungjawab (*responsibility*)**

Secara logis, prinsip tanggungjawab mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas yang menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan manusia dengan membuatnya bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. (Naqvi, 1993:86). Artinya suatu perbuatan akan terwujud bilamana perbuatan tersebut merupakan produk pilihan sadar dalam situasi bebas, di mana

pertanggungjawaban bisa diberlakukan. Dengan demikian, semakin besar wilayah kebebasan maka semakin besar pula pertanggungjawaban moralnya. (Hidayat,1995:510).

Tanggungjawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Dalam prinsip ini, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan akan menerima akibatnya dari apa yang menjadi pilihannya. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya. (Beekun,2000:26).

Islam memberi kebebasan kepada manusia, namun ia sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Konsepsi tanggungjawab dalam Islam mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus, baik pada tingkat individual maupun tingkat sosial, yang keduanya harus dilakukan secara bersama-sama. Dalam kaitan ini, Islam membedakan bobot nilai tanggungjawab secara individu dan kolektif melalui *farḍhu 'ain* dan *farḍhu kifayah*.

Konsep ini memiliki dua aspek fundamental, yakni: *pertama*, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia. *Kedua*, konsep tanggung jawab dalam Islam merupakan suatu keharusan, maksudnya adalah setiap manusia wajib bertanggung jawab atas segala apa yang pernah dilakukan selama di muka bumi.

Dalam bidang ekonomi, aksioma ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia telah menyerahkan suatu tanggungjawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri, ia juga harus menyadari tingkat penghasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain. Aksioma pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan.

## **Pendekatan Aksioma Dalam Ilmu Ekonomi Islam**

Empat aksioma di atas menyoroti sejumlah aspek penting dari filsafat etika Islam yang bertujuan menghasilkan tatanan sosial ekonomis dan harmonis bagi manusia yang bebas, bertanggungjawab, tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri tetapi juga kesejahteraan orang lain dalam masyarakat, dan menuntut tidak hanya peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga dalam kesejahteraan spiritual.

Dari uraian tentang aksioma etika yang merujuk pada pemikiran Naqvi, terlihat bahwa dalam ekonomi Islam, ajaran-ajaran Islam merupakan bagian yang integral. Bila dikaitkan dengan pembahasan tentang etika Islam yang merupakan bentuk dari pelaksanaan ajaran Islam itu sendiri, berarti dalam ekonomi Islam, etika menduduki posisi penting dan merupakan unsur yang integral dalam sistem ekonomi Islam. Namun di sisi lain, Islam juga memberi ruang bagi manusia untuk mengatur pelaksanaan sistem ekonomi, sesuai dengan situasi dan kondisi, yang berarti akan terjadi dialog antara etika dengan realitas tanpa merubah esensi syariat.

Oleh karenanya, ekonomi Islam pada dasarnya mengedepankan pendekatan integratif antara normatif dan positif. Islam menempatkan nilai yang tercermin dalam etika pada posisi yang tinggi. Jadi, etika harus menjadi kerangka awal dalam ilmu ekonomi. Penjelasan, pemahaman dan penilaian atas perilaku dan masalah-masalah ekonomi hingga upaya pencapaian tujuan ekonomi harus dilakukan dengan kerangka ilmu sosial yang integral, tanpa mendikotomikan etika dan realita secara absolut. Integrasi etika dan realita dalam pandangan Islam tentu saja bukan seperti pemahaman Max Weber tentang *wertfrei*, dimana nilai tidak dapat disatukan dengan ilmu pengetahuan. Masalah kepercayaan tidak dapat diselesaikan dengan ilmiah, karena ilmu pengetahuan tidak dapat menunjukkan apa yang harus dikerjakan, ia hanya dapat menerangkan syarat-syarat dan konsekuensi tindakan, sebab dalam pandangan Islam etikalah yang harus menguasai ilmu ekonomi bukan sebaliknya.

Pendekatan aksiomatik dalam ekonomi Islam merupakan alat analisis yang digunakan untuk menyusun elemen dasar ilmu ekonomi Islam. Penerapan pendekatan ini secara konsisten akan menghasilkan bagian ilmu ekonomi modern yang tidak bertentangan dengan aksioma etik Islam ke dalam model ekonomi Islam. Sistem aksioma yang ditawarkan Naqvi merupakan representasi yang memadai dari

sudut pandang etika Islam dan juga merupakan alat analisis yang layak untuk menggali hakekat ekonomi Islam.

Naqvi mampu membuktikan bagaimana konsep tauhid dan keseimbangan dapat digunakan sebagai sarana-sarana analitis untuk menyusun landasan teori ekonomi Islam. Meskipun sebagian dari kesimpulan-kesimpulannya agak terlalu sederhana, analisisnya memaksanya untuk menangani masalah-masalah seperti cara produksi, peranan teknologi dan pembagian sumber alam yang selama ini luput dari perhatian ahli moneter muslim.

Kekuatan dari pendekatan aksiomatis adalah bahwa dia menyediakan bukan hanya sarana-sarana bagi analisis dan menuntun pencarian, tetapi juga menghasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk dijalankan. Namun demikian, Naqvi belum mampu menemukan dan membangun lembaga-lembaga yang dapat menyingkirkan bunga. Oleh karena itu, riba -yang bertentangan dengan kerangka aksiomatis yang disusunnya- dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diinginkan dalam masyarakat dan memainkan peranan yang berguna untuk hendaknya diterima sampai tiba waktunya ketika bunga dapat digantikan oleh mekanisme finansial yang dibenarkan dalam Islam dan terjadi perubahan-perubahan struktural yang bercakupan luas.

Kajian tentang nilai-nilai sistem ekonomi Islam mempunyai pola-pola tersendiri. Mas'udul Alam Chaudary, dalam pemikiran ekonominya menyatakan bahwa prinsip ekonomi Islam yang paling utama adalah tauhid dan persaudaraan. Dalam pengertian yang lebih luas, persaudaraan menggambarkan sifat kemanusiaan dalam ekonomi Islam. Kemudian prinsip selanjutnya adalah kerja dan produktifitas, di mana penghargaan terhadap kerja dan produktifitas akan menciptakan profesionalisme sekaligus keadilan dalam kegiatan ekonomi. Prinsip terakhir adalah mendistribusikan kekayaan. (Chaudary,1997:23-31). Pola yang sama dilakukan oleh Chapra, bahwa konsep nilai sistem ekonomi Islam berangkat dari sebuah prinsip fundamental Islam yang meliputi tauhid, khilafah dan keadilan. (Chapra, 2001:132-135).

Keberadaan etika dalam aspek ekonomi adalah sesuatu yang harus dikonstruksi secara jelas supaya keberadaan kedua hal tersebut tidak menjadi hal yang sifatnya dualistik -untuk tidak mengatakan pisah sama sekali- dalam praktek maupun teori, ekonomi konvensional merupakan jawaban atas dualisme diatas. Dalam Islam jelas,

etika dan ekonomi merupakan hal yang inheren dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Walaupun demikian, di dalam paradigma ekonomi Islam, etika dan ekonomi masih perlu dibumikan dalam satu bangunan yang utuh, baik teori maupun prakteknya.

Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktek ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma dan nilai-nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan aplikasi dan analisis sejarah. Ekonomi Islam bukan semata-mata bidang kajian yang berdasarkan pada persoalan-persoalan nilai, tetapi juga bidang kajian keilmuan. Keterpaduan ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu, menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan menggunakan metode pengetahuan, sehingga ekonomi Islam bisa dikaji dan dikembangkan sekaligus dapat dipraktekkan.

### **Simpulan**

Secara historis, terdapat keterkaitan yang erat antara etika dan ekonomi, di mana pada awalnya ekonomi merupakan bagian dari permasalahan etika. Dalam kondisi tersebut, setiap perilaku ekonomi harus mengacu kepada etika sebagai suatu pandangan hidup tentang mana yang benar dan mana yang salah. Pada kenyataannya, masalah ekonomi akan selalu sampai pada titik temunya dengan etika karena yang menjadi subyeknya adalah manusia dalam suatu masyarakat yang tidak bisa terlepas dari suatu pandangan etis. Hal ini berarti bahwa etika memiliki tempat sekaligus ikut mengarahkan kegiatan ekonomi yang ada dalam suatu sistem ekonomi.

Dalam Islam, permasalahan ekonomi mendapatkan perhatian dan pandangan yang positif sehingga dalam Islam terdapat hukum dan institusi-institusi ekonomi yang dapat memungkinkan terbentuknya suatu sistem ekonomi, di mana syariat Islam menjadi sumber dan ajaran etis bagi kegiatan ekonomi di dalamnya. Postulat umum yang terdapat dalam teori ekonomi Islam, yaitu penggabungan ilmu ekonomi dan etika dielaborasi dalam pembentukan kaidah-kaidah perilaku ekonomi dalam

masyarakat. Dan perilaku tersebut dihubungkan dengan empat macam aksioma etika yang bersama-sama membentuk sistem etika Islam yang sangat logis. Sebagai makhluk teomorfis (*aksioma taubid*) yang diberikan mandat untuk menebarkan kebajikan dan keadilan dalam semua aspek kehidupan (*aksioma keseimbangan*), manusia diberikan kebebasan ekonomi untuk meningkatkan usaha dan etos kerja (*aksioma kebebasan*). Namun kebebasan *ikhtiyariah* ini dengan cakupannya yang luas bermuara pada (*aksioma tanggungjawab*), baik terhadap kehidupan sosial maupun kehidupan sendiri di dunia dan di akhirat kelak.

## Daftar Pustaka

- Amin, Ahmad, *Etika*, alih bahasa Farid Ma'ruf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988)
- Barcalaw, Emmet, *Moral Philosophy: Theories And Issues*, edisi 2, (ttp: Wadsworth Publishing Company, 1998)
- Bartels, R., "A Model for Ethics in Marketing", *Journal of Marketing*, 1967, Vol. 31, No. 1.
- Beekun, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islam*, alih bahasa Muhammad, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2000)
- Bertens, Kees, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Kanisius, 2000)
- Chaudary, Mas'udul Alam, *Money In Islam, A Study In Islamic Politycal Economic*, (London & New York : Rontledge, 1997)
- Djatnika, Rahmat, *Sistem Etika Islam*, (Surabaya : Pustaka Islam, 1985)
- Dahlan, Abdul Aziz, (ed) *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Dunfee, T.W. and Gunther, R., "Ethical Issues in Financial Services", *Business and Society Review*, 1999, Vol. 104
- Etzioni, Amitai, *The Moral Dimensions: Towards a New Economics* (New York: Macmillan, 1988)
- al-Faruqi, Ismail Raji, *AL TAWHID: Its Implications for Thought and Life*, Kuala Lumpur: IIT, 1992.
- Hunt, S.D., & Vitell, S.J., "A General Theory of Marketing Ethics", *Journal of Macromarketing*, 1986, Vol. 6, No. 1,
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: LPPI, 2000)
- George, Richard T. De, *Business Ethics*, (New Jersey: Prentice Hall, 1995)
- Kurian, V. Mathew, *Ethics And Economics, A Case For Value Based Economics*, (tt.: Jeevadhara, 1995)



- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam, : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi*, alih bahasa Machnun Husain, cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995)
- Misanan, Munrokhim, *Ekonomi Islam* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008)
- Muthahhari, Murtadha, *al-Adl al-Ilahi*, (Taheran : Dar al-Islamiah, 1981)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997)
- Naqvi, Syed Nawab Haedar, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Sebuah Sintesis Islami*, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat, (Bandung : Mizan, 1993)
- \_\_\_\_\_, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003)
- Nabhani, Taqiyuddin an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996)
- Nadwi, Abul Hassan Ali, "The Most Suitable Religion for Mankind", in Altaf Gauhar (ed.), *The Challenge of Islam*, Islamic Council of Europe, London, 1978.
- Qardawi, Yusuf al-, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, cet. 1, (Jakarta : Robbani Press, 1997)
- Rahman, Budhy Munawar, (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995)
- Raharjo, Dawam, *Etika Ekonomi Dan Manajemen*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1990)
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedia al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta : Paramadina, 1996)
- Robertson, D.C., & Anderson, E., "Control System And Task Environment Effects on Ethical Judgment: An Exploratory Study Of Industrial Salespeople", *Organisation Science*, 1993, Vol. 4, No. 4
- Saeed, Mohammad, Zafar U. Ahmed, Syeda-Masooda Mukhtar, "International Marketing Ethics an Islamic Perspective: A Value-Maximization Approach", *Journal of Bisnis Ethics*, 2001, Vol. 32, No.2,
- Samuelson, Paul A., *Ekonomi*, alih bahasa Jaka Wasana, (Jakarta : Erlangga, 1989)
- \_\_\_\_\_, *Etika Dasar : Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999)
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)

- Shaw, William H., *Social And Personal Ethics*, edisi 3 (USA : Wadsworth Publishing Company, 1999)
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997)
- Soule, George, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka, Dari Aristoteles Hingga Keynes*, alih bahasa T. Gilarso, (Yogyakarta : Kanisius, 1994)
- Suseno, Frans Magnus, *Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionis*, Cet. 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2007)
- Triyuwono, Iwan, *Organisasi Dan Akuntansi Syariah*, , (Yogyakarta: LkiS, 2000)
- Turnipseed, D.L., "Are Good Soldiers Good? Exploring The Link Between Organisation Citizenship Behaviour and Personal Ethics," *Journal of Business Research*, 2002, Vol. 55, No. 1,
- Ya'qub, Hamzah, *Etika Islam*, (Jakarta: CV. Publicita, 1978)
- Wellman, Carl, *Moral and Ethics*, (New York: Prentice Hall, 1998)
- Winardi, *Ilmu Ekonomi Dan Aspek-Aspek Metodologinya*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990)
- Weber, Max, *Etika Protestan Dan Semangat Kapitalisme*, alih bahasa Yusuf Priasudirja, I (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000)